

Judul : Opsi Perpanjangan Pansus Terbuka
Tanggal : Senin, 25 September 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Opsi Perpanjangan Pansus Terbuka

Perbaiki Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang lembaga antirakyat itu yang saat ini dinilai sangat besar.

RICHALDO Y HARIANDJA
richaldo@mediaindonesia.com

PERPANJANGAN masa kerja Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimungkinkan bila kerja belum rampung dan perlu investigasi lebih lanjut. Hal itu harus melalui pembicaraan di antara pimpinan fraksi DPR.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya memberi kebebasan kepada Fraksi PDIP untuk melakukan pembicaraan tersebut. Sebagai informasi, masa kerja pansus akan berakhir pada Kamis (28/9).

"Sekiranya belum selesai dan butuh pendalaman yang lebih lanjut, ya, tentu saja diberikan ruang bagi pansus untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," ucap Hasto saat ditemui di sela Kursus Politik Pancasila yang digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, kemarin.

Yang terpenting, lanjut dia, pansus tetap pada semangat perbaikan kinerja KPK. Menurut dia, perbaikan tersebut untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang KPK yang saat ini dinilai sangat besar.

Intinya, PDIP memastikan operasional KPK dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. "Sebenarnya yang kami minta hanya satu, KPK dalam menjalankan tugasnya itu sesuai peraturan perundangan," imbuh Hasto.

Hasto menegaskan PDIP tidak akan mendukung adanya

pembubaran KPK. Itu sebabnya pada saat salah satu kader partai mengusulkan pembekuan KPK, PDIP memberikan teguran langsung.

Hasto juga menyatakan tidak akan ada intervensi dari presiden dalam kerja pansus. Reposisi Ma-sinton Pasaribu dalam pansus pun dikatakan dia ialah hal yang biasa dalam mekanisme partai.

Langkah KPK yang bekerja sama dengan pihak terkait melelang barang rampasan dari para koruptor mendapat apresiasi meski lelang itu disebut agak terlambat.

"Enggak ada sama sekali, enggak ada, kami pastikan hal itu. Itu hal yang biasa dilakukan di internal fraksi. Enggak ada kaitannya dengan Presiden," tegas dia.

Hasto juga menyatakan PDIP akan terus bersikap tegas terhadap kadernya yang terkena kasus korupsi. Setiap kepala daerah dari PDIP yang terkena kasus korupsi akan dipecat. PDIP pun menjamin untuk tidak mencalonkan kader yang bermasalah dengan korupsi. "Itu boleh dicek, kok."

Keberhasilan pansus

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengklaim pansus berhasil menemukan dan mengungkap kesemrawutan tata kelola barang sitaan oleh KPK. Kini, sebagian dari barang sitaan yang sudah resmi menjadi rampasan negara diselesaikan melalui mekanisme lelang.

"(Tentu) setelah Pansus Hak Angket mempermasalahkannya," ucap Bambang seperti dikutip Metrotvnews.com di Jakarta, kemarin.

Bambang merujuk pada lelang yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan selama dua hari, Jumat dan Sabtu lalu. Acara itu melelang sejumlah barang sitaan dari para koruptor yang ditangani KPK.

Bambang pun mengapresiasi langkah KPK yang bekerja sama dengan pihak terkait dalam melelang mobil rampasan dari para koruptor. Itu dinilainya sebagai bentuk kepatuhan terhadap Pansus Hak Angket.

Namun, pelelangan barang bekas milik para koruptor itu tidak sepenuhnya membuat lega hati politikus Golkar tersebut. Pasalnya, pelelangan itu dinilai terlambat.

"Kalau saja barang sitaan tersebut dilelang sesuai keputusan *inkracht* pengadilan empat tahun lalu, pasti penerimaan negara lebih tinggi dari sekitar Rp3 miliar yang diterima saat ini karena kondisi barang sitaan tersebut relatif lebih baik (saat itu)," tutur Bambang. (Dro/P-1)

Panitia Khusus Hak Angket KPK

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK dibentuk sebagai kelanjutan protes terkait dengan persidangan kasus dugaan korupsi KTP-E. Banyak nama anggota DPR disebut menerima aliran dana dari megaproyek tersebut. Di penghujung bulan ini, masa kerja mereka akan berakhir.

Dibentuk : 30 Mei 2017
• Rapat perdana : 7 Juni 2017
• Mulai bekerja : 4 Juli 2017
• Anggaran : Rp3,1 miliar
• Akhir masa kerja : 28 September 2017

Pansus Hak Angket dan Tudingan terhadap KPK

Penyadapan Liar



Tudingan: Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar mengatakan pihaknya perlu mendalami masalah penyadapan yang dilakukan KPK.

Bantahan: Juru bicara KPK **Febri Diansyah** menyatakan validitas penyadapan yang dilakukan penyidik KPK sudah diakui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dana Hibah ke ICW



Tudingan: Pakar hukum pidana **Romli Atmasasmita** mengkritik mata anggaran KPK yang ditujukan kepada organisasi antikorupsi. Tudingan itu didasari laporan BPK pada 2015.

Bantahan: "Yang pasti tidak pernah ada aliran dana tersebut. Informasi itu telah dibantah juga oleh ICW," kata juru KPK Febri Diansyah.

36 Tersangka KPK tanpa Bukti Cukup



Tudingan: Romli Atmasasmita mengungkapkan penetapan 36 tersangka oleh KPK tidak disertai bukti-bukti yang cukup.

Bantahan: Mantan Ketua KPK **Taufiequrachman Ruki** menegaskan pernyataan yang disampaikan Romli tidak benar. "Saya harap informasi tersebut bisa dikoreksi agar tidak merugikan KPK," kata Ruki.

Ancaman dan Intimidasi KPK



Tudingan: Tersangka **Muchtar Effendi** mengungkap sejumlah ancaman dan intimidasi yang dialaminya dalam proses penangkapan hingga penyidikan di KPK.

Bantahan: Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menegaskan, "Penetapan tersangka tidak didasari dendam atau ancaman, tapi hasil ekspose banyak orang, penyidik, JPU, pimpinan, diambil kesimpulan ME terlibat melakukan korupsi suap sengketa pilkada MK di Kabupaten Empat Lawang."

Kedekatan Ibas dan Pejabat KPK



Tudingan: Saksi kasus korupsi Wisma Atlet, **Yulianis** mengatakan, lantaran memiliki kedekatan dengan Samad dan Bambang, Ibas tak pernah diperiksa penyidik KPK terkait dengan dugaan penerimaan uang dari Nazaruddin.

Bantahan: Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan faktor kedekatan seseorang dengan pejabat di lembaga antirasywah tak akan berpengaruh dalam penanganan suatu perkara.

KPK Terima Rp1 Miliar



Tudingan: Yulianis menyatakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pernah memberikan uang sebesar Rp1 miliar kepada mantan komisioner KPK Adnan Pandu Praja. Yulianis mendapat cerita tersebut dari anak buah Nazaruddin.

Bantahan: Menurut **Adnan Pandu Praja**, kesaksian itu tidak benar dan tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan karena saksi mendengar dari orang lain, bukan menyaksikan sendiri.



MI

KPK Terima Rp1 Miliar

Tudingan: Yulianis menyatakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pernah memberikan uang sebesar Rp1 miliar kepada mantan komisioner KPK Adnan Pandu Praja. Yulianis mendapat cerita tersebut dari anak buah Nazaruddin.

Bantahan: Menurut **Adnan Pandu Praja**, kesaksian itu tidak benar dan tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan karena saksi mendengar dari orang lain, bukan menyaksikan sendiri.



MI

KPK Anak Emaskan Nazaruddin

Tudingan: Yulianis menganggap KPK menganakemaskan M Nazaruddin karena meski telah berstatus tersangka dan ditahan KPK, Nazaruddin masih dengan bebas mengintimidasi para karyawannya saat hendak bersaksi di KPK.

Bantahan: Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK **Priharsa Nugraha** membantah ada perlakuan istimewa terhadap BAP Muhammad Nazaruddin. Menurut Priharsa, dalam proses penanganan perkara, tentu ada teknik tertentu.



MI

Korupsi Pembangunan Gedung KPK

Tudingan: Dari hasil audit keuangan BPK, pansus menuding terjadinya penggelembungan dana pembangunan gedung baru KPK dan hibah untuk Indonesia Corruption Watch.

Bantahan: Jubir KPK Febri Diansyah membantah dan menyatakan selama ini KPK selalu menerima opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.



MI

Barang Sitaan KPK

Tudingan: Ketua Pansus Hak Angket KPK **Agun Gunandjar Sudarsa** menganggap adanya ketidakcocokan data barang sitaan KPK dengan temuan Pansus sehingga berpotensi pada penyusutan nilai barang sitaan.

Bantahan: Jubir KPK Febri Diansyah menegaskan KPK sudah memberikan perhatian khusus terhadap barang sitaan dari kasus dugaan korupsi. Febri juga menyatakan KPK sudah berkoordinasi dengan Rupbasan terkait dengan pengelolaan dan perawatan barang sitaan tersebut.



MI

Penyidik KPK minta uang Rp2 miliar

Tudingan: Berdasarkan keterangan tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu proyek KTP Elektronik Miryam S Haryani, penyidik KPK Brigjen Aris Budiman disebut menemui dan meminta Rp2 miliar kepada anggota Komisi III DPR terkait pengamanan kasus korupsi KTP-E.

Bantahan: Penyidik KPK **Brigjen Aris Budiman** menyatakan tidak pernah bertemu anggota DPR, kecuali pada forum resmi seperti rapat. Ia juga menjelaskan tidak pernah menerima uang Rp2 miliar terkait kasus tersebut.



MI

Ketua KPK Agus Rahardjo Terlibat Korupsi KTP-E

Tudingan: Koordinator Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara (JIN) Razikin Juraid melaporkan Agus Rahardjo ke Kejaksaan Agung terkait dengan keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan KTP-E.

Bantahan: **Mahfud MD** menilai Agus tidak terlibat dalam kasus KTP-E. Menurutnya, Agus saat itu hanya menyampaikan saran terkait dengan pengerjaan KTP-E.



MI

Ketua KPK Agus Rahardjo Terindikasi Korupsi (Dinas Bina Marga)

Tudingan: Agus diduga terlibat dalam kasus korupsi saat menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Bantahan: Juru bicara KPK Febri Diansyah menganggap tudingan itu membingungkan. "Agak membingungkan ya. Setahu kami pansus angket membahas tugas terkait dengan pelaksanaan dan kewenangan KPK," kata Febri.

Sumber: Dokumentasi MI